

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. (2024). Profil dan Inovasi Layanan eSPPTPBB. Kota Jambi: BPPRD Kota Jambi.
- Desty, W. D. (2022). Pengantar Ilmu Perpajakan dan Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Furqon, R. H. (2022). "Penerapan Digitalisasi Pajak dan Tantangannya di Daerah". Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 8(1), 56–70.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nugroho, R. (2020). Public Policy in Indonesia: Inovasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Digital. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013. Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2019. Tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2012. Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016. Tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018. Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021. Tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)
- Republik Indonesia. (1985). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1994). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, Siti. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Salamah, Siti. (2018). “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 94–104.
- Setiawati, T., & Diana, A. (2009). *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syarif Fasha. (2021). *Nota Dinas Wali Kota Jambi: Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*. Kota Jambi.
- Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. (2022). *Laporan Tahunan TP2DD Provinsi Jambi*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.